

**KOMPLEKSITAS TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM DALAM
KONTEKS DESENTRALISASI ASIMETRIS: ANALISIS
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH**

TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat S-2



M U F A Z Z A L
14010121420025

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
DEPARTEMEN POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH (TESIS)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : Mufazzal
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14010121420025
3. Tempat / Tanggal Lahir : Manggeng, 10 November 1995
4. Jurusan / Program Studi : Ilmu Politik / S-2
5. Alamat : Jln. Laksamana Malahayati, Km.23, Komplek
Indra Patra, Gampong Ladong, Kec. Mesjid
Raya, Aceh Besar, Aceh.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Tesis) yang saya tulis berjudul:

**KOMPLEKSITAS TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM
DALAM KONTEKS DESENTRALISASI ASIMETRIS: ANALISIS
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH**

Adalah benar Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri, bukan hasil karya ilmiah orang lain atau plagiasi karya ilmiah orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti secara meyakinkan bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil plagiasi karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh sanksi lainnya dari Universitas Diponegoro, sebagai akibat perbuatan yang saya lakukan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, 30 Oktober 2024

 **MUFAZZAL**

NIM. 1401012142002

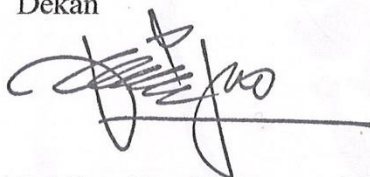
HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : Kompleksitas tata Kelola Sumber Daya Alam dalam
Konteks Desentralisasi Asimetris: Analisis Kewenangan
Pusat dan Daerah
Nama Penyusun : Mufazzal
NIM : 14010121420025
Jurusan : S2-Ilmu Politik

**Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan
Strata II Program Studi Ilmu Politik**

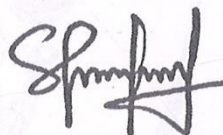
Semarang, 10 November 2024

Dekan



Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol. Admin
NIP. 19690822.199403.1.003

Wakil Dekan I



S. Rouli Manalu, S.Sos., M.Comm.St., Ph.D.
NIP. 198209282005012001

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP., M.PP.
198105072005012002


(.....)

2. Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D
197110111997021001


(.....)

Dosen Penguji Tesis:

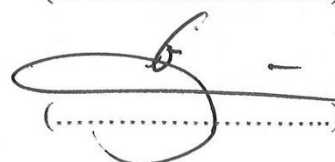
1. Dr. Dra. Rina Martini, M.Si.
NIP. 196703131993032001


(.....)

2. Dr. Dra. Kushandajani, M.S.
NIP.196206141986032002


(.....)

3. Dr. Sos. Dra. Fitriyah, M.S.
196203271986032001


(.....)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur, tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya. Dengan kuasa-Nya lah penulis dapat meraih pendidikan master dan menyelesaikannya.
2. Kedua Orang Tua saya tercinta, Ayahanda Darwis MD dan Ibunda Samsiah yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang serta dukungan do'a yang tiada hentinya, semangat maupun perhatian yang tak terhingga yang selalu dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis. Serta keluarga saya, Kak Samsidar, Asnidar, Masnidar, Adik Muhammad Rizal dan Ronita yang selalu mendukung, mendoakan, membantu penulis serta menjadi kekuatan penulis dalam proses penyelesaian penelitian tesis ini.
3. Pemerintah Aceh, dalam hal ini terkhusus kepada BPSDM sebagai lembaga yang memberikan beasiswa magister penuh kepada saya untuk melanjutkan studi hingga akhir.
4. PYM Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Alhaythar, Ketum Partai Aceh H. Muzakir Manaf, Sekretaris Jenderal Partai Aceh H. Kamaruddin Abubakar, Ketua Komisi 1 DPR Aceh Tgk. Muhammad Yunus, Ketua DPR Aceh Dahlan Sabena dan seluruh keluarga besar DPP Partai Aceh yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan.
5. Keluarga besar Magister Ilmu Politik 2021, teman-teman seperjuanganku Ilham, Denny, Renaldy, Evan, Bang Miqdad, Niswa, Alm Bang Boy, Umar, dan Mas Yopih. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari sejarah perjalanan ini.
6. Keluarga besar Ikatan Masyarakat Aceh Semarang (IMAS) dan Ikatan Pelajar Aceh Semarang (IPAS), serta sahabat-sahabat penghuni Asrama Yayasan Pocut Meurah Intan.
7. Sahabat dan teman-teman penulis di Aceh, Jakarta dan Semarang yang tidak memungkinkan penulis sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai syarat kelulusan Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bimbingan, petunjuk, saran, masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP., M.PP. selaku dosen pembimbing pertama penulis yang senantiasa membimbing dan mendukung penulis dalam setiap proses penulisan tugas akhir;
2. Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D. selaku dosen pembimbing kedua penulis yang senantiasa membimbing dan mendukung penulis dalam setiap proses penulisan tugas akhir;
3. Dr. Dra. Rina Martina, M.Si selaku Penguji I dalam sidang Tesis penulis sekaligus senantiasa memberikan dukungan, bimbingan, arahan maupun kekuatan serta segala informasi terkait perkuliahan dan penelitian kepada penulis dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis diberi kemudahan, kekuatan dan kelancaran;
4. Dr. Dra. Kushandajani, M.S. selaku Penguji II dalam sidang Tesis sekaligus dosen wali penulis;
5. Dr. Sos. Dra. Fitriyah, M.S. selaku Penguji III dalam sidang Tesis penulis;
6. Prof. Dr. Suharmono, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
7. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang;
8. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang;

9. Dr. Dra. Rina Martina, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang;
10. 10. Para informan dilingkungan Pemerintah Aceh, Wali Nanggroe Aceh, DPR Aceh, CSO, Akademisi dan elemen sipil lainnya yang telah membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk mendukung penelitian penulis;
11. 11. Mas Widi, Mas Apri, Mas Sholeh beserta Seluruh staf dan karyawan MIP FISIP Undip yang bersedia membantu dalam memperlancar penelitian ini.

Judul : Kompleksitas Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Konteks
Desentralisasi Asimetris: Analisis Kewenangan Pusat dan Daerah
Nama : Mufazzal
NIM 14010121420025
Departemen : Politik dan Pemerintahan / Ilmu Politik

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tarik menarik kepentingan dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan yang berkarakter desentralisasi asimetris. Penelitian ini menganalisis kompleksitas tata kelola sumber daya alam dalam konteks desentralisasi asimetris di Indonesia, dengan fokus pada analisis kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Tujuannya untuk menciptakan keseimbangan dan kestabilan hubungan pusat dan daerah, serta aspek-aspek yang mempengaruhinya seperti regulasi, elite dan stakeholder. Sehingga menciptakan keharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada tata kelola yang efektif dan berkelanjutan, terutama pada aspek tata kelola sumber daya alam. Metodologi kualitatif diterapkan dengan menggunakan kajian pustaka dan 25 narasumber untuk di wawancara sebagai informan. Adapun teknis pengambilan informan dilakukan dengan *purposive sampling* dan *snowball*. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, focus group discussion dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teori *stakeholder analysis* dari John M Bryson dan kerangka kerja *powercube* dari John Gaventa. Penelitian ini memberikan gambaran holistik mengenai aspek-aspek yang menjadi penyebab hubungan pusat dan daerah menjadi lebih kompleks pada tata kelola sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarik menarik kepentingan mengakibatkan tumpang tindih kebijakan regulasi yang pada akhirnya menghambat upaya tata kelola sumber daya alam yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah pusat kurang memberikan ruang kepada daerah untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan. Pada sisi lain, pemerintah daerah kurang melibatkan pemangku kepentingan lokal, sehingga semakin memperburuk situasi, di mana daerah dengan kewenangan besar tetapi menghadapi kesulitan dalam implementasi kebijakan. Studi ini merekomendasikan perlunya harmonisasi kebijakan dan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mencapai tata kelola yang efektif dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi literatur mengenai desentralisasi asimetris dan tata kelola sumber daya alam, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merencanakan desentralisasi asimetris yang lebih baik.

Kata kunci: Desentralisasi asimetris, Tata kelola sumber daya alam, stakeholder, powercube

Title : The Complexity of Natural Resources Governance in the Context
of Asymmetric Decentralization: Analysis of Central and Regional
Authorities
Name : Mufazzal
NIM 14010121420025
Department : Politics and Government / Political Science

ABSTRACT

This research is motivated by the attraction of interest in the relationship between central and local governments in a unitary state characterized by asymmetrical decentralization. This research analyzes the complexity of natural resource governance in the context of asymmetric decentralization in Indonesia, focusing on analyzing the authority of the central government and the Aceh government. The goal is to create balance and stability in the relationship between the center and the regions, as well as the aspects that affect it such as regulations, elites, and stakeholders. Thus creating harmony between the central and local governments, which ultimately contributes to effective and sustainable governance, especially in the aspect of natural resource governance. Qualitative methodology was applied using a literature review and 25 resource persons to be interviewed as informants. The technical sampling of informants was done by purposive sampling and snowball. Data collection used observation, interview, focus group discussion, and documentation techniques. The data obtained was analyzed using John M Bryson's stakeholder analysis theory and John Gaventa powercube framework. This research provides a holistic picture of the aspects that cause central and regional relations to become more complex in natural resource governance. The results show that the tug-of-war of interests results in overlapping regulatory policies that ultimately hamper efforts for effective and sustainable natural resource governance. In addition, the central government provides less space for regions to be involved in policymaking. On the other hand, the local government lacks the involvement of local stakeholders, thus further exacerbating the situation, where regions with great authority face difficulties in policy implementation. This study recommends the need for policy harmonization and the importance of involving stakeholders in natural resource management to achieve effective and sustainable governance. The findings make an important contribution to the literature on asymmetric decentralization and natural resource governance and provide practical recommendations for policymakers in planning for better asymmetric decentralization.

Keywords: Asymmetric decentralization, Natural resource governance, stakeholders, powercube

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	16
1.3. Tujuan Penelitian.....	17
1.4. Manfaat Penelitian	17
1.4.1. Manfaat Teoretis	17
1.4.2. Manfaat Praktis	17
1.5. Tinjauan Pustaka.....	18
1.6. Kerangka Pemikiran	25
1.6.1. Desentralisasi Asimetris	26
1.6.2. Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Hubungan Pemerintah Pusat - Daerah.....	29
1.6.2.1. Sentralisasi atau Desentralisasi ?	33
1.6.2.2. Desentralisasi Asimetris Sumber Daya Alam.....	35
1.6.3. Stakeholder dan Interelasi Pusat – Daerah dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam	36
1.6.3.1. Stakeholder	36
1.6.3.2. Stakeholder dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam.....	42
1.6.4. Powercube.....	46
1.7. Kerangka Berfikir	54
1.8. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional	55
1.9. Metode Penelitian	58
1.9.1. Pendekatan Penelitian.....	58
1.9.2. Jenis Penelitian.....	59
1.9.3. Tipe Penelitian	60
1.9.4. Fokus Penelitian	61
1.9.5. Jenis dan Sumber Data.....	61
1.9.6. Informan Penelitian	62
1.9.7. Instrumen Penelitian.....	65
1.9.8. Teknik Pengumpulan Data.....	67
1.9.8.1. Observasi.....	67
1.9.8.2. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)	69
1.9.8.3. Focus Group Discussion.....	71
1.9.8.4. Dokumen	73
1.9.9. Teknik Analisis Data	74
1.9.9.1. Reduksi data	74
1.9.9.2. Penyajian data	75
1.9.9.3. Penarikan Kesimpulan.....	75
BAB II KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK DESENTRALISASI ASIMETRIS ACEH	77
2.1. Kehidupan Sosial Masyarakat Aceh	78
2.2. Budaya dan Agama Masyarakat Aceh	83
2.3. Kondisi Ekonomi	89

2.4. Politik dan Pemerintahan	94
BAB III SUMBER DAYA ALAM DAN KEPENTINGAN POLITIK.....	106
3.1. Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi	110
3.2. Sumber Daya Mineral dan Batubara.....	115
3.3. Sumber Daya Perkebunan	122
3.4. Sumber Daya Kehutanan	123
3.5. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	125
3.6. Pengaturan dan Implikasi Politik Desentralisasi Sumber Daya Alam	127
BAB IV KOMPLEKSITAS TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM DI ACEH	131
4.1. Tumpang Tindih Regulasi.....	131
4.1.1. Wilayah Kewenangan.....	133
4.1.2. Penanaman Modal Asing.....	137
4.1.3. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria.....	144
4.1.4. Wilayah Izin Usaha Pertambangan.....	146
4.1.5. Kerja sama Pengelolaan Hutan	150
4.1.6. Perikanan Tangkap	153
4.2. Kompleksitas Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Konteks desentralisasi Asimetris	162
4.2.1. Stakeholder dalam Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Sumber Daya Alam	162
4.2.1.1. Stakeholder Pemerintahan.....	165
4.2.1.2. Stakeholder Swasta	198
4.2.1.3. Stakeholder Masyarakat Sipil	214
4.2.2. Eks Gerakan Aceh Merdeka dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam	244
4.2.3. Elit Politik dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam.....	253
BAB V REFLEKSI PENELITIAN.....	257
5.1. Implikasi Teoretis	265
5.2. Implikasi Kebijakan.....	267
BAB VI PENUTUP	269
6.1. Kesimpulan	269
6.2. Keterbatasan Penelitian.....	274
6.3. Rekomendasi dan Penelitian Selanjutnya.....	274
DAFTAR PUSTAKA	276

Daftar Gambar

Gambar 1: Kontribusi Desentralisasi Asimetris Terhadap Pembangunan Daerah	4
Gambar 2: Komponen dalam tata kelola sumber daya alam	32
Gambar 3: Matriks analisis peran stakeholder	40
Gambar 4: The power cube: the levels, spaces and form of power	49
Gambar 5: Kerangka Berpikir.....	54
Gambar 6: Pertumbuhan Ekonomi Aceh.....	90
Gambar 7: Angka Pengangguran Terbuka di Aceh	91
Gambar 8: Kontribusi Dana Otsus terhadap APBA.....	92
Gambar 9: Kemiskinan Aceh (dalam persen).....	93
Gambar 10: Peta Wilayah Minyak & Gas Aceh.....	114
Gambar 11: Tampilan halaman aplikasi OSS.....	151
Gambar 12: Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder	165
Gambar 13: Pertumbuhan Ekonomi Aceh 2022-2024	170
Gambar 14: Struktur PDRB Aceh Dari Jenis Usaha Tahun 2023 (persen).....	171
Gambar 15: Komposisi DBH Sumber Daya Alam Terhadap Pendapatan Aceh di Luar Dana Otsus Aceh	173
Gambar 16: Diagram Ketenagakerjaan Provinsi Aceh Agustus 2023	175
Gambar 17: Persentase Pekerja menurut Lapangan Usaha (persen), 2021-2023.....	176
Gambar 18: Info grafis Bencana di Aceh Periode Januari-Agustus Tahun 2023	184
Gambar 19: PNPB Sumber Daya Alam Dalam Lima Tahun Terakhir	194
Gambar 20: Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2021-2023	196
Gambar 21: Daftar Izin Usaha Pertambangan di Aceh yang diterbitkan pada tahun 2022 ...	208
Gambar 22: Capaian Perhutanan Sosial di Aceh Hingga Juli 2024	217
Gambar 23: Perhutanan Sosial yang Telah Mendapat Izin dari KLHK.....	218
Gambar 24: Daerah Aliran Sungai Wih Gile di Kabupaten Bener Meriah	236
Gambar 25: Sekelompok ibu-ibu di Bener Meriah, Aceh, sedang patroli menjaga hutan (rangers)	237

Daftar Tabel

Tabel 1: Regulasi Kewenangan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Aceh Era Desentralisasi Asimetris	7
Tabel 2: A Typology of Tree Resource Stakeholders on a Macro-Micro Continuum.....	43
Tabel 3: A Classification of Trade-offs and Conflicts at Different Levels in NRM.....	44
Tabel 4: Definisi Operasional	57
Tabel 5: Informan Penelitian	63
Tabel 6: Instrumen Kebijakan Politik Menangani Stabilitas Politik Aceh.....	104
Tabel 7: Blok Minyak dan Gas di Aceh	113
Tabel 8: Dana Bagi Hasil Migas untuk Aceh	115
Tabel 9: Daftar Perusahaan Penerima Izin Tambang Era Gubernur Nova Iriansyah dan Pj Gubernur Ahmad Marzuki	118
Tabel 10: Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral dan Batubara.....	119
Tabel 11: Potensi Sektor Mineral, Batubara, Energi Air, Panas Bumi dan Migas di Aceh ..	119
Tabel 12: Dana bagi Hasil Sumber Daya Kehutanan dari Pemerintah Pusat ke Aceh	125
Tabel 13: Dana Bagi Hasil Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari Pusat ke Aceh	126
Tabel 14: Rangkuman Temuan Konflik Regulasi Pusat – Aceh dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	160
Tabel 15: Tipologi Pengelolaan Kelola Sumber Daya Alam	163
Tabel 16: : Pendapatan Aceh dari DBH Sumber Daya Alam.....	172
Tabel 17: Daftar Perusahaan Nasional dan Multi-nasional yang Beroperasi di Aceh	200
Tabel 18: Data Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap Provinsi Aceh (orang)	228
Tabel 19: Profil PT Emas Mineral Murni.....	255
Tabel 20: Profil Perusahaan Linge Resources Mineral.....	255
Tabel 21: Profil Perusahaan Gayo Mineral Resources.....	255

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-125/MB.05/SJN.H/2023 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara pemerintah Daerah Aceh.
2. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1090/MEN-KP/VII/2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Sub sektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Sub sektor Pengangkutan Ikan.
3. Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/MENLHK/SETJEN/HPL.2/5/2023 Tentang Penyesuaian kerja sama Pemanfaatan Hutan Pada KPH Menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
4. Daftar Data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Komoditas Mineral dan Batubara di Aceh Hingga Tahun 2024.
5. Peta Wilayah Kerja Perusahaan Migas yang sedang Eksplorasi dan Eksploitasi di Aceh Tahun 2023.